# BAB I

# PENDAHULUAN

## Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang, pendidikan merupakan sesuatu hal yang harus didapatkan oleh semua orang. Pemerintah di Indonesia telah menerapkan Sistem Wajib Belajar 9 Tahun (SD/MI, SMP/MTS) untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan, bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun masih ada beberapa anak yang masih belum bisa menyelesaikan masa 9 tahun belajar. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan biaya pada keluarga anak tersebut. Oleh sebab itu pemerintah menciptakan suatu program demi tercapainya Program Wajib Belajar 9 tahun, yaitu yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meletakkan prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang mengalami hambatan ekonomi, sosial budaya, geografis; dan penduduk yang mengalami hambatan karena kelainan fisik, emosi, mental serta kelemahan intelektual. Keberhasilan aspek ini diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan SDM yang berkualitas, beriman serta bertaqwa. Serta bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Semua Sekolah Negeri dan Swasta berhak memperoleh BOS*.* Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (program penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima B0S harus menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan. Sekolah yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOSmempunyai hak untuk menolak BOS tersehut. Sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanan. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa dan komite sekolah, bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah harus dapat menjamin kelangsungan siswa tersebut.

Pendidikan SD, SMP, dan SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Pembangunan pendidikan di Kota Cimahi dititikberatkan kepada peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya, disamping itu kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan urusan pendidikan diarahkan pada terwujudnya pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing serta berakhlak mulia.

Hasil evaluasi terhadap pembangunan pendidikan, Indeks Pendidikan (IP) Kota Cimahi pada tahun 2014 sebesar 74,02% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 74,08%, pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,50%. Target pendidikan pada Tahun 2014 Kota Cimahi telah mencapai Wajar Dikdas 9 Tahun dan mulai Tahun 2006 Kota Cimahi mencanangkan rintisan pendidikan wajib belajar 12 Tahun. Berhasilnya pencapaian RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan atau Angka Partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi kasar (APK) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro Kota Cimahi dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan.

Data pencapaian APM pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: pencapaian APM tingkat SD/sederajat sebesar 86,81%. APM tingkat SMP/sederajat sebesar 51,05%, dan APM tingkat SMU/sederajat adalah sebesar 45,53%. Sedangkan untuk Pencapaian Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan penduduk seluruh umur yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap kelompok umur tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. Data indikator pencapaian APK diseluruh jenjang sekolah yang ada di Kota Cimahi pada Tahun 2014, yaitu: pencapaian APK tingkat SD/sederajat pada Tahun 2014 sebesar 99,82%. APK tingkat SMP/sederajat pada Tahun 2014 sebesar 70,51%. APK tingkat SMU/sederajat pada Tahun 2014 sebesar 65,76%.

Secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi permasalahan di bidang pendidikan menyangkut peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencakup; pengelolaan pendidikan dengan manejemen pendidkan berbasis sekolah, peningkatan kualitas kurikulum dan relevansi pendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan peranserta masyarakat/lingkungan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud pembangunan pendidikan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi.

Pendanaan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yaitu biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Menurut peraturan di atas bagaimana dengan kebutuhan siswa yang kurang mampu seperti tas, sepatu, buku untuk mencatat dan lain sebagainya agar rakyat yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada kenyataannya tetap saja orang-orang yang mampu dan lebih lah yang lebih diutamakan. Selain itu terkadang pemerintah terlambat untuk pencairan dana BOS yang menyebabkan keterhambatan siswa dalam belajar selain itu sekolah pun terpaksa harus mengutang demi kelangsungan belajar siswa, dan berdampak pula pada guru honorer yang dibiayai oleh BOS.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat ada beberapa SMP yang masih belum cukup memenuhi aspek pelayanan yang sudah di tentukan. Oleh sebab permasalahan di atas, penulis akan membahas *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA CIMAHI (studi pada Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Cimahi)”.*

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus masalah ini, bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah sebagai salah satu faktor penting untuk memperbaiki kualitas sekolah. Maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program BOS?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan BOS dan bagaimana pihak sekolah menangani hambatan-hambatan yang ada?
3. Bagaimana pengaruh positif dan negatif saat pelaksanaan program BOS?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program BOS.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan BOS dan bagaimana pihak sekolah menangani hambatan-hambatan yang ada.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif dan negatif saat pelaksanaan program BOS.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan pembelajaran yang diperoleh peneliti selama perkuliahan;
2. Kegunaan praktis, hasil peneliti diharapkan sebagai sumber pemikiran agar menjadi masukan dan kritikan terhadap permasalahan dalam implementasi kebijakan BOS pada SMP Swasta di Kota Cimahi.
3. Kegunaan bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan mengenai implementasi kebijakan.

## 1.5 Lamanya Penelitian

Penelitian kualitatif, waktu menjadi hal yang tidak dapat diprediksikan. Hal ini karena data yang diperoleh bisa berkembang dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Tetapi penelitian ini dimulai pada bulan April 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Tahun 2018** |
| **Maret** | **April** | **Mei** | **Juni** | **Juli** | **Agustus** | **September** |
| **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Tahap Persiapan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | a. Perizinan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | b. Penjajagan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | c. Pengajuan Judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | d. Pembuatan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | e. Perbaikan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 2 | Studi Tahap Penelitian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | a. Observasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | b. Wawancara |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 3 | Tahap Penyusunan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | a. Pengolahan Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | b. Analisis Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | c. Pembuatan Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | d. Perbaikan Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4 | Tahap Pengujian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | a. Seminar Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | b. Penelaahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | c. Sidang Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian